KEBIJAKAN PIDANA MATI DALAM PERSPEKTIF HAM

Oleh:

Rosa Kumalasari, Universitas Diponegoro

e-mail: rosasugito@gmail.com

Abstrak

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, termasuk hukum pidana. Makna Pancasila harus menjiwai tujuan hukum pidana. Karena itu, tujuan pidana terhadap Bangsa Indonesia bukan saja harus bernafaskan aspirasi bangsa Indonesia saja melainkan harus juga berurat akar dalam batang tubuh Bangsa Indonesia. Dengan perkataan lain tujuan pidana selain harus mencerminkan Pancasila, ia pun harus pula diterapkan dengan semangat dan jiwa Pancasila. Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya ditengah maraknya perdebatan terkait eksistensi pidana mati. Pro dan kontra yang selalu muncul mengenai pidana mati tidak lain selalu dihubungkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Kata kunci: *Kebijakan Pidana Mati, Perspektif HAM*

Abstract

Pancasila is the source of all sources of law, including criminal law. The meaning of Pancasila must animate the purpose of criminal law. Therefore, the criminal purpose of the Indonesian nation not only must breathe the aspirations of the Indonesian nation alone should be entrenched within the body of the Indonesian Nation. In other words, the criminal purpose in addition to having to return behind Pancasila, he must also with the spirit and soul of Pancasila. Indonesia is one of the countries that still consistently impose capital punishment in its national law amidst the debate related to the existence of capital punishment. The pros and cons that always appear on capital punishment are none other than human rights.

Keywords: *Dead Criminal Policy, Human Rights Perspective*

PENDAHULUAN

Pidana mati merupakan pidana yang selalu menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun hampir di seluruh negara di dunia. Setiap ahli hukum, aktivis hak asasi manusia dan lain sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.¹

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih konsisten memberlakukan pidana mati dalam hukum nasionalnya, hal ini terbukti dengan mengakui legalitas pidana mati melalui beberapa pasal yang terdapat pada Undang-undang yang masih digunakan dan berlaku di negeri ini, seperti pada KUHP, Undang-undang No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika, UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 26 Tahun 2000 mengenai Pengadilan HAM, Undang-undang No. 23 mengenai Perlindungan Anak, Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu RI Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang semua perbuatannya dianggap sebagai suatu *extra ordinary crimes* yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Banyak pendapat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satunya adalah Ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Nasional Anti Narkotika Henry Yosodiningrat yang menyatakan bahwa pidana mati melanggar Pasal 28 A dan 28 I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pendapat lain yang

menyatakan tidak setuju dengan adanya pidana mati adalah Dr. Soedikno Mertokusumo,SH., dalam disertasinya tahun 1971 yang berjudul “Sejarah Peradilan & PerUndang-undangan di Indonesia sejak tahun 1942 dan apakah manfaatnya bagi kita bangsa Indonesia”, dalam salah satu lampiran dalil mengatakan bahwa pidana mati agar dihapuskan karena bertentangan dengan dasar Negara Republik Indonesia Pancasila. Selain itu, trend di dunia menunjukkan, makin sedikit negara yang menerapkan pidana mati. Menurut laporan Amnesty Internasional, dari 195 negara, 86 negara yang menerapkan pidana mati dan 75 negara lainnya sudah menghapusnya. Menurut kabar terbaru Filipina merupakan negara yang menghapuskan pidana mati pada Juni 2006 lalu.²

Prof. Dr. Achmad Ali, SH menyatakan bahwa ”Penerapan pidana mati sangat dibutuhkan khususnya di Indonesia, tetapi harus diterapkan secara spesifik dan selektif. Spesifik artinya hukuman mati diterapkan untuk kejahatan - kejahatan serius (*”heinous”*) mencakupi korupsi, pengedar narkoba, teroris, pelanggar HAM yang berat dan pembunuhan berencana. Dan yang dimaksudkan dengan selektif adalah bahwa terpidana yang dijatuhi hukuman mati harus yang benar-benar yang telah terbukti dengan sangat meyakinkan di pengadilan (*”beyond reasonable doubt”*) bahwa memang dialah sebagai pelakunya.”³ Dalam Pasal 28 J ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa HAM seseorang dibatasi oleh HAM orang lain dan juga peraturan perUndang-undangan. Jelaslah bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana mati, telah melanggar HAM orang lain dan juga peraturan perUndang-undangan yang membatasi HAM itu.

¹ Djoko Prakoso, *Masalah Pidana Mati*, (Jakarta: Bina Aksara,1987), hlm. 100

² www.wikipedia.id

³ Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007

Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat dengan menerapkan pidana yang setimpal atas perbuatan terpidana. Alasan kuat mengapa pidana mati tetap dipertahankan keberadaannya di Indonesia adalah karena vonis atau pidana mati mendapat dukungan yang luas dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Pemungutan suara yang dilakukan media di Indonesia pada umumnya menunjukkan 75% dukungan untuk adanya vonis mati.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum pidana positif mengatur tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari peraturan hak asasi manusia?
2. Bagaimana hukum pidana yang akan datang mengatur tentang pelaksanaan pidana mati dilihat dari peraturan hak asasi manusia?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang secara umum mempunyai pengertian studi yang logis dan bersifat sistematis, mengenai prinsip-prinsip yang mengarah kepada penelitian ilmiah, sarana dan cara yang digunakan untuk memahami obyek yang hendak diteliti. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan yang bersifat normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum atau berpedoman pada segi hukumnya yaitu berusaha untuk menelaah suatu peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

B. Tahap Penelitian

Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Pendahuluan

Tahap ini, peneliti melaksanakan pengajuan usulan mengenai penelitian yang akan dilaksanakan dengan menyusun suatu proposal yang mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, peneliti kemudian melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi dengan objek yang akan diteliti. Dalam memperoleh data, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, literatur dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti.

3. Tahap Akhir

Pada tahap ini, peneliti melakukan telaah atas isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

C. Metode Penelitian

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dan sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Metode berpikir deduktif merupakan metode berpikir dimana aturan hukum disajikan terlebih dahulu kemudian diakhiri dengan fakta hukum yang terjadi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Mati dalam Hukum Pidana Positif Dilihat dari Perspektif HAM

Pidana mati dalam hukum pidana sebagai sarana mencapai tujuan dari hukum pidana yaitu memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan telah banyak menimbulkan perdebatan antar sesama ahli hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang setuju dicantumkannya pidana mati dalam hukum pidana positif, dilihat dari sudut Pancasila cukup beralasan. Bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan di Indonesia dengan alasan demi perlindungan masyarakat, untuk mencegah kejahatan berat, demi keadilan dan persatuan Indonesia.⁴ Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) menegaskan “Dengan keyakinan dan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan YME dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial.”

Dari penegasan tersebut jelas terlihat pengakuan dan keterjalinan antara aspek kemanusiaan dan aspek kemasyarakatan. Salah satu aspek kemanusiaan yang sangat mendasar ialah hak untuk hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupannya. Hak ini sangat asasi karena diberikan langsung kepada setiap manusia. Oleh karena itu, setiap orang berhak mempertahankan atau membela diri terhadap setiap ancaman atau serangan yang tertuju pada keselamatan jiwanya.

Berlandaskan pada Pasal 28 A Amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan kehidupannya, banyak kalangan berpendapat bahwa eksistensi pidana mati di Indonesia bertentangan dengan Pasal 28 A tersebut. Dengan demikian pidana mati di Indonesia dianggap telah melanggar hak konstitusional. Selain itu pelaksanaan pidana mati merupakan tindakan pelanggaran hak asasi

manusia. Secara yuridis yang dimaksudkan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu setiap perbuatan seseorang atau sekelompok termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapat, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dari uraian pasal tersebut, yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM adalah perbuatan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan secara melawan hukum. Akan tetapi, menurut kalangan aktivis HAM sifat melawan hukum dalam pelaksanaan hukuman mati di Indonesia adalah karena sudah melanggar hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 A jo Pasal 28 I Amandemen ke dua UUD 1945.

Dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan tidak bisa hanya mengkaji pasal demi pasal secara parsial, perlu diperhatikan pula ketentuan secara hirarki dan komprehensif dari keseluruhan pasal yang ada. Dengan demikian dapat dipahami maksud pasal tersebut secara utuh. Pasal 28 J Amandemen ke dua UUD 1945, nampak bahwa dengan pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar hak hidup seseorang memiliki pembatasan. Pasal 28 J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban

⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 7

umum dalam suatu masyarakat demokratis. Dengan demikian, walaupun setiap orang memiliki hak hidup dan kehidupan, namun hak tersebut tidak absolut adanya. Hak tersebut dibatasi dengan penerapan pidana mati sepanjang dijalankan sesuai norma serta nilai yang berlaku. Dapat dikatakan pula bahwa pelaksanaan pidana mati sejalan dan dijamin oleh hukum dasar konstitusi. Pembatasan itu justru bermaksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Pengertian hak hidup sebagaimana diatur dalam UUD 1945 adalah hak dimana setiap orang tidak boleh diambil nyawanya secara semena-mena.

Ditegaskan pula dalam Pasal 73 Undang-undang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Sesuai dengan uraian di atas bahwa hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa oleh orang lain (berupa pembunuhan) atau oleh negara (berupa penjatuhan pidana mati) pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM apabila dilakukan sewenang-wenang atau tanpa dasar pembenaran yang sah menurut hukum yang berlaku. Dengan perkataan lain tidak seorangpun dapat dirampas kehidupannya (dibunuh atau dikenakan pidana mati) secara sewenang-wenang. Sehubungan dengan masalah pembunuhan dan pelaksanaan pidana mati yang sewenang-wenang (*“extralegal execution”*), resolusi ke-5 Kongres PBB ke-6 Tahun 1980 mengenai *The Prevention Of Crimes And The Treatment Of Offenders*,

secara tegas mengutuk dan menegaskan bahwa perbuatan seperti itu merupakan suatu “kejahatan yang sangat menjijikkan yang pembasmiannya merupakan prioritas internasional yang sangat utama.” Penegasan kongres tersebut selengkapnya berbunyi :⁵

1. *Deplores and condemns the practice of killing and executing political opponents or suspected offenders carried out by armed forces, law enforcement or other governmental agencies or by paramilitary or political groups acting with the tacit or other support of such forces or agencies*, yaitu menyesalkan dan mengutuk praktek pembunuhan dan eksekusi lawan politik atau pelaku diduga dilakukan oleh pasukan bersenjata, penegak hukum atau badan pemerintah lain atau oleh kelompok paramiliter atau politik bertindak dengan dukungan diam - diam atau lainnya kekuatan atau lembaga tersebut.
2. *Affirms that such contitutea particularly abhorrent crime, the eradication of which is a high international priority*, yaitu menegaskan bahwa contitutea seperti kejahatan yang sangat menjijikkan, pemberantasan yang merupakan prioritas internasional yang tinggi.

Beberapa pertimbangan yang dikemukakan dalam resolusi tersebut antara lain dengan mengingat :⁶

1. Artikel 3 dari *Universal Declaration of Human Rights* yang menjamin hak hidup, hak kebebasan, dan hak keamanan setiap orang (*the right to life, liberty, and security of person*).
2. Artikel 6 paragraf 1 dari *Internaional Covenant on Civil and Political Right* yang melarang perampasan hak hidup seseorang secara sewenang-wenang (*“No one shall be arbitrarily deprived of his life”*).
3. Pembunuhan yang dilakukan atau ditoleransi oleh pemerintah dikutuk oleh semua sistem

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP*

Baru), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.64

⁶ *Loc.Cit.*

hukum nasional dan, dengan demikian oleh prinsip - prinsip hukum pada umumnya. (*Murder committed or tolerated by Government is condemned by all national legal system and, thus by general principles of law*).

Penegasan Kongres PBB ke-6 itu pun ditegaskan lagi dalam Resolusi ke-11 Kongres ke-7 Tahun 1985 di Milan.

Mengakui hak hidup sebagai hak yang sangat asasi, berarti perampasan hak hidup seseorang itu sekiranya terpaksa dilakukan, pada hakikatnya merupakan suatu perkecualian. Ini berarti, dilihat dari sudut hukum pidana, sejauh mungkin pidana mati itu harus dihindari. Sekiranya terpaksa dijatuhkan harus sudah melewati prosedur yang sangat ketat. Prosedur atau tahap-tahap yang sangat ketat itu antara lain dapat dijatuhkan untuk delik - delik tertentu yang dipandang sangat jahat atau sangat serius, diberikan hak untuk minta pengampunan, peringanan, penundaan, atau perubahan/ penggantian pidana mati setelah melewati masa tertentu.

Segala bentuk perampasan hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Namun dalam suasana tertib hukum, untuk seseorang dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM atau dilihat dari sudut hukum pidana dinyatakan telah melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada hukum dan perUndang-undangan yang berlaku.

Penggunaan pidana mati dirasakan masih sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan yang berat. Hal itu dapat dilihat dari KUHP Nasional yang masih menempatkan pidana mati sebagai pidana pokok, selain itu terhadap hukum pidana di luar KUHP juga terdapat sebagian yang menempatkan pidana mati sebagai sanksi dari dilanggarnya perbuatan tersebut. Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Stelsel Pidana Indonesia mengatakan bahwa KUHP Indonesia membatasi kemungkinan

dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat-berat saja. Yang dimaksudkan dengan kejahatan - kejahatan yang berat itu adalah:

1. Makar dengan maksud membunuh Presiden dan wakil Presiden diatur dalam Pasal 104 KUHP.
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang diatur dalam Pasal 111 ayat (2) KUHP.
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh diwaktu perang diatur dalam Pasal 124 ayat (3) KUHP.
4. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat dalam Pasal 140 ayat (3) KUHP.
5. Pembunuhan berencana pada Pasal 340 KUHP.
6. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 365 ayat (4) KUHP.
7. Pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati pada Pasal 368 ayat (2) KUHP.
8. Pembajakan di laut yang menyebabkan kematian pada Pasal 444 KUHP.
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada:
 - a. Pasal 479 K ayat (2) KUHP ;
 - b. Pasal 479 O ayat (2) KUHP.

Sedangkan ancaman pidana mati yang terdapat di luar KUHP yang merupakan tindak pidana khusus, antara lain :

1. Tindak Pidana tentang Senjata Api, Amunisi, atau sesuatu Bahan Peledak diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/DRT/1951.
2. Tindak Pidana Ekonomi dalam Pasal 1 ayat (2) Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang memperberat ancaman hukuman UU No. 7 /DRT/1955.
3. Tindak Pidana tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Tenaga Atom, yaitu dalam Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1964.
4. Tindak Pidana Narkotika dan Psicotropika. Sanksi pidana mati dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat pada beberapa pasal, yaitu :
 - a. Pasal 113 ayat (2) ;
 - b. Pasal 114 ayat (2) ;
 - c. Pasal 118 ayat (2) ;

- d. Pasal 119 ayat (2) ;
- e. Pasal 121 ayat (2).

Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, pidana mati diatur dalam Pasal 59 ayat (2).

- 5. Tindak Pidana Korupsi terletak dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU NO. 20 Tahun 2001.
- 6. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia dalam UU No. 26 Tahun 2000 terdapat pada Pasal 36 dan 37.
- 7. Tindak Pidana Terorisme dalam Perpu No.1 Tahun 2002, pidana mati disini diatur dalam beberapa pasal, yaitu Pasa 6 sampai Pasal 10.

Perpu No. 1 Tahun 2002 ini ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 Tahun 2003 yang kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pidana mati sebagai suatu kebijakan criminal (*criminal policy*) dapat diartikan ke dalam 3 (tiga) kategori. Sebagaimana dipaparkan Sudarto sebagai berikut bahwa “Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik criminal, politik criminal ini dapat diartikan sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit politik criminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Adapun dalam arti yang lebih luas ia merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang paling luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perUndang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Penegakan norma -norma sentral ini

dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan”.⁷

Berdasarkan pemikiran Sudarto di atas, maka dapat kita ketahui bahwa, kebijakan pidana mati merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan. Penanggulangan yang efektif merupakan salah satu cara yang harus diperhatikan dalam kebijakan kriminal, usaha-usaha penanggulangan kejahatan secara prefentif sebenarnya juga bukan hanya dari kepolisian saja, namun dapat juga diartikan secara umum yakni secara tidak langsung dapat juga ditempuh tidak menggunakan sarana pidana atau hukum pidana.

Pidana mati bukan saja memberikan jaminan perlindungan atas hak asasi semua warga negara, tetapi telah sejalan dengan kesepakatan-kesepakatan masyarakat Internasional yang beradab. Fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi dan sekaligus untuk menjaga keseimbangan berbagai kepentingan baik masyarakat, negara, pelaku tindak pidana, maupun korban (*viktim*) tindak pidana. Oleh karena itu perampasan atau pembatasan hak asasi manusia yang dilihat dari sudut hukum pidana hanya dibenarkan apabila berdasarkan peraturan yang berlaku.

B. Pengaturan Hukum Pidana Mati dalam Hukum Pidana yang Akan Datang Dilihat dari Perspektif HAM

Upaya pembaruan hukum pidana dalam pembentukan suatu RUU KUHP Nasional merupakan kebutuhan pokok masyarakat agar tercipta penegakan hukum yang adil.⁸ Namun, pembaharuan hukum pidana nasional dilakukan tidak hanya karena alasan politis (dimana merupakan kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP Nasional sendiri), alasan sosiologis

⁷ Sudarto, *Kapita Selektia Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm.113-114.

⁸ Pembaruan KUHP yang pernah dilakukan selama ini adalah Konsep RUU tentang Asas-asas dan Dasar-dasar Pokok Tata Hukum Pidana dan Hukum Pidana Indonesia (Depkeh RI tahun 1964), Konsep Rancangan KUHP

Buku I (LPHN, 1968), Konsep Rancangan KUHP 1968/1972 (BPHN), Konsep KUHP Buku II (BPHN, 1979) dan Rancangan KUHP 1999/2000 (BPHN dan Depkeh HAM RI), RUU KUHP tahun 2008 dan 2010 (BPH dan Kemenhum HAM).

(merupakan tuntutan sosial untuk mempunyai KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional), alasan praktis (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia), tetapi juga karena alasan adaptif, bahwa KUHP nasional dimasa datang harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan - perkembangan baru, khususnya perkembangan internasional yang sudah disepakati oleh masyarakat beradab.⁹ Keamanan dalam naungan hukum didambakan oleh warga masyarakat yang mengalami ketakutan dalam kejahatan (*fear of crime*)¹⁰ sehingga perlu upaya penanggulangan kejahatan melalui perUndang-undangan pidana sebagai bagian dari langkah kebijakan akibat dari semakin meningkatnya kualitas, kuantitas, dan intensitas pelanggaran hukum. Semua ini dapat dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai politik kriminal yang dilakukan oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan keadilan. Mark Ancel memberikan definisi tentang *kriminele politiek* sebagai “*rationale organisate van maatschappelijke reakties of misdaad*”.¹¹ (Artinya, usaha rasional dari reaksi masyarakat di dalam upaya penanggulangan kejahatan). Kebijakan hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan bidang hukum pidana materiil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksana pidana.¹²

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa, “Kebijakan hukum pidana akan melalui tiga tahapan, yaitu (1) tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-undang yang disebut dengan kebijakan legislative sebagai

tahap formulasi hukum; (2) tahap penegakan hukum *in concreto* pada penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari pihak kepolisian sampai pengadilan yang disebut dengan kebijakan yudikatif sebagai tahap aplikasi hukum; dan (3) tahap penegakan hukum *in concreto* pada pelaksanaan pidana berupa pidana penjara oleh petugas pelaksana pidana/ pidana penjara yang disebut dengan kebijakan eksekutif sebagai tahap administrasi eksekusi hukum.”¹³

Pembentukan RUU KUHP sampai saat ini berada dalam tahap formulasi hukum pidana. Pada tahap ini segala aspek hukum dan jenis sanksi pidana dapat diberikan oleh warga masyarakat sebagai masukan kepada pihak pemerintah yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) demi terwujudnya kesempurnaan dari RUU KUHP yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bangsa Indonesia. Masukan dari masyarakat ini masih terbuka lebar sebelum ditetapkan dan diberlakukan suatu KUHP Nasional.¹⁴

Kriminalisasi suatu perbuatan pidana dapat berasal dari kaidah-kaidah sosial yang menjadi sumber pembentukan kaidah hukum pidana yang meliputi nilai-nilai, kaidah-kaidah moral, agama, budaya yang hidup dalam kesadaran masyarakat.¹⁵ Apabila KUHP Nasional terbentuk maka ketiga tahapan seperti yang dijelaskan di atas merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem penegakan hukum pidana. Semua hal tersebut akan menjadi lebih baik apabila ditambah dengan masukan dari warga

⁹ Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP*, (Semarang: UNDIP, 1990).

¹⁰ Steven Box, *Power Crime and Mystification*, (London, New York: Tavistock Publication, 1983), hlm. 2

¹¹ G.P. Hoefnagels, *De Paradox van de Straf*, (Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink, 1977), hlm. 23

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 29-30

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Pasca Baru Reformasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 20

¹⁵ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformai Hukum Pidana, Jurnal, Hukum No 11, Vol.6*, (Yogyakarta: FH UII, 1999), hlm. 1-2

masyarakat sebagai ketentuan hukum yang hidup.¹⁶

Eksistensi pidana mati dalam RUU KUHP sebagai sarana kebijakan pembaharuan hukum pidana tentang pidana mati di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari jiwa hukum pidana Indonesia sebagai sarana penjatuhan pidana terhadap pelanggaran yang terjadi, dan tidak terlepas pula tujuan pidana mati itu sendiri. Hal tersebut berarti bahwa pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak terlepas dari ide dan kebijakan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila. Sebagaimana dikatakan Anwar & Adang bahwa, “Pembaharuan hukum pidana (KUHP), tidak dapat dilepaskan dari ide atau kebijakan pembangunan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan kebangsaan yang dicita-citakan. Ini mengandung arti bahwa, pembaharuan hukum pidana nasional seyogyanya harus dilatarbelakangi oleh sumber-sumber yang berorientasi kepada ide dasar (*basic ideas*) yang di dalamnya mengandung konsep ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial”.¹⁷

Sejalan dengan pendapat di atas, Prof. Barda memaparkan, “Kekurangwaspadaan dan kurang bijaksana dari pengajar hukum pidana di dalam menyampaikan dogma-dogma dan substansi yang terdapat di dalam KUHP, akan menghasilkan “*output*” yang terlalu kaku (*dogmatis*) sehingga dapat menghambat tujuan penegakan hukum pidana maupun ide-ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia”.¹⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pembaharuan hukum pidana di Indonesia harus mengacu pada Pancasila dan tujuan negara yang

termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, dengan kata lain bahwa pembaharuan hukum pidana mengenai pidana mati harus sesuai dengan ruh yang terkandung di dalam Pancasila dan pembukaan UUD 1945 sebagai sumber hukum Indonesia.

Sebagaimana dikatakan Wahjono, “Hukum yang berlaku bagi suatu negara mencerminkan perpaduan antara sikap, dan pendapat pimpinan pemerintahan negara dan keinginan masyarakat luas mengenai hukum tersebut. Sikap dan pendapat para pemimpin pemerintahan, jelas harus berpangkal pada instruksi yang berupa aturan-aturan pokok di dalam Undang-undang Dasar, diselaraskan dengan keadaan”.¹⁹

Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi. Meski diwarnai dengan *discenting opinion* dan lingkup putusan yang terbatas dalam judicial review tindak pidana narkoba, namun putusan tersebut memiliki nilai keterwakilan atas pandangan masyarakat luas yang masih memandang bahwa pidana mati masih layak untuk dipertahankan.

Beberapa tindak pidana yang tergolong sebagai tindak pidana luar biasa (*extraordinary crime*) seperti tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, maupun *illegal logging*, *illegal fishing* pantas dijatuhi pidana mati. Bukan hanya karena tindak pidana tersebut yang sangat terorganisir, namun akses negatif yang meluas dan sistematis bagi khalayak, menjadi titik tekan yang paling dirasakan masyarakat. Maka sebagai langkah yuridis yang menentukan eksistensi keberlakuan pidana hukuman mati di Indonesia, putusan MK ini mendapat apresiasi yang representatif. Putusan MK tersebut semakin memperkuat posisi pidana mati sebagai sarana penjatuhan pidana.

¹⁶ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Op.Cit.*, hlm. 21

¹⁷ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 22.

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 128

¹⁹ Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 23

Rancangan (RUU) KUHP dilatarbelakangi oleh berbagai pokok pemikiran yang secara garis besar dapat disebut dengan ide keseimbangan. Ide keseimbangan ini meliputi:

1. keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/ masyarakat dan kepentingan individu/ perorangan.
2. keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.
3. keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
4. keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan.
5. keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/ universal.

Berpijak dari pokok pikiran keseimbangan tersebut, menunjukkan bahwa RUU KUHP masih mempertahankan pidana mati. Di samping pokok pemikiran tersebut, dipertahankannya pidana mati juga didasarkan pada ide menghindari tuntutan/ reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, tak terkendali atau bersifat *extra-legal execution*. Artinya, disediakannya pidana mati dalam Undang-undang dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi/ tuntutan masyarakat. Karena tidak tersedianya pidana mati dalam Undang-undang, bukan merupakan jaminan tidak adanya pidana mati dalam kenyataan di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi/ masyarakat yang tidak rasional, maka dipandang lebih bijaksana apabila pidana mati tetap tersedia dalam Undang-undang. Dengan adanya pidana mati dalam Undang-undang, diharapkan penerapannya oleh hakim akan lebih selektif dan berdasarkan pertimbangan yang rasional/ terkendali. Jadi dimaksudkan juga untuk memberi perlindungan individu/ warga masyarakat dari

pembalasan yang sewenang-wenang dan emosional dari korban atau masyarakat apabila pidana mati tidak diatur dalam Undang-undang.

RUU KUHP memuat hal-hal baru yang membedakannya dengan KUHP, salah satunya adalah ancaman pidana mati yang tidak dicantumkan dalam pidana seperti yang tercantum pada Pasal 10 KUHP, namun diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif. Ketentuan sanksi pidana mati pada RUU KUHP 2012 diatur dalam pasal tersendiri, yaitu Pasal 66, yang menyatakan, "*Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif*". Pasal 87 menyatakan "*Pidana mati secara alternative dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat*".

Pengaturan pidana mati lebih rinci tertuang dalam Pasal 87-90 RUU KUHP 2012. Diletakkannya pidana mati ke dalam pidana alternatif pada pasal tersendiri menunjukkan bahwa pidana mati hanyalah sebagai sarana terakhir atau perkecualian yaitu sebagai obat terakhir dilihat dari tujuannya bahwa pidana mati pada hakikatnya bukan merupakan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki individu atau masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyusun RUU KUHP masih berpegang pada prinsip bahwa pidana mati masih diperlukan sebagai bagian dari sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam memutuskan perkara secara selektif dalam upaya mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.²⁰

²⁰ Laporan Hasil Penelitian "*Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pidana*", Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982. Laporan Akhir

Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamaza, SH, tentang "*Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indo*

Pidana mati dalam RUU KUHP menjadi pidana yang istimewa (khusus), karena hanya dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 89 RUU KUHP sebagai pidana khusus dan upaya terakhir, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap pidana mati dapat ditunda yaitu:

- (1) pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun, jika:
 - a. reaksi masyarakat terhadap terpidana tidak terlalu besar;
 - b. terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
 - c. kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana tidak terlalu penting;
 - d. ada alasan yang meringankan.
- (2) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki maka pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Pidana mati yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap yang tidak dijalankan (eksekusi) selama 10 (sepuluh) tahun maka Presiden menerbitkan putusan untuk mengubahnya menjadi pidana seumur hidup. Hal tersebut tertuang jelas pada Pasal 90 RUU KUHP 2012.

Ketentuan tentang pidana mati menunjukkan bahwa penggunaan pidana mati dalam RUU

KUHP tidak dimaksudkan ke dalam jenis hukuman mati. Hal ini ditandai dengan menempatkan pidana mati sebagai pidana khusus yang dipergunakan secara selektif. Pertimbangan untuk menjatuhkan pidana mati ditujukan pada perbuatan dan dampak perbuatan terdakwa, agar ancaman pidana mati dapat seimbang (*balance*) dengan perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa yakni menimbulkan akibat kematian orang. Jika perbuatan tidak sampai menimbulkan akibat matinya orang, sejauh mungkin dihindari untuk menjatuhkan pidana mati, kecuali perbuatan yang sangat membahayakan bagi kehidupan manusia pada saat sekarang dan di masa yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pidana mati baru dijatuhkan setelah upaya - upaya hukum maupun upaya - upaya kemanusiaan telah ditempuh. Termasuk masa bersyarat selama sepuluh tahun dan perubahan menjadi pidana penjara sementara waktu.

SIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Pidana mati merupakan pidana yang masih sangat efektif dalam mencegah kejahatan yang dapat dikualifikasikan dalam kejahatan berat, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan pidana mati merupakan upaya yang efektif dalam menanggulangi kejahatan. Hal tersebut terlihat dari ditematkannya pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP, juga terlihatnya pidana mati dalam peraturan perUndang-undangan di luar KUHP. Pengaturan dan pelaksanaan pidana mati bukanlah suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa dalam perspektif HAM pidana mati bukanlah suatu bentuk pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia apabila penggunaan atau pelaksanaannya tidak dilakukan secara

sewenang-wenang dan berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Pidana mati dalam hukum pidana yang akan datang masih digunakan, terbukti dengan masih dibubuhkannya pidana mati dalam RUU KUHP. Namun penggunaan pidana mati dalam RUU KUHP ini tidak sama dengan apa yang diatur dalam KUHP nasional yang ada sekarang. Berbeda dengan KUHP yang menempatkan pidana mati pada pidana pokok dalam jenis pidananya, pidana mati dalam RUU KUHP 2012 diatur dalam pasal tersendiri yaitu pada Pasal 66 RUU KUHP. Dalam Pasal 66 RUU KUHP tersebut dijelaskan bahwa pidana mati bukanlah merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. Hal itu berarti RUU KUHP masih akan tetap mempertahankan pidana mati sebagai sarana penjatuhan pidana walaupun penggunaannya bukan sebagai sarana pidana pokok karena pidana mati hanya diperuntukkan pada ancaman terhadap jenis - jenis kejahatan tertentu yang bersifat serius dengan aturan penerapan yang sangat selektif berupa alternatif. Sama halnya dengan amputasi di bidang kedokteran, yang pada hakikatnya juga bukan sarana/ obat utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai obat terakhir. Hal tersebut berkaitan erat dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Hak Asasi Manusia bahwa kebebasan terkait hal-hal yang diatur dalam Undang-undang tersebut dapat dibatasi oleh Undang-undang atau peraturan yang berlaku untuk menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu ditegaskan dalam Konsep KUHP bahwa pidana mati secara alternatif dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

B. Saran

Perlu dilakukan kajian ulang secara komprehensif mengenai penerapan pidana mati dalam RUU KUHP sebagai pembaharuan hukum pidana Indonesia, baik mengenai adanya masa percobaan 10 tahun, maupun adanya peluang untuk dapat diminta grasi, dan juga terkait eksekusi yang dilakukan tidak di muka umum. Selain itu perlu diperhatikan juga oleh para penegak hukum dalam memutuskan menjatuhkan pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adham Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Bachsan Mustofa, 1984, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Remaja Karya
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 1987, *Masalah Pidana Mati (Soal Jawab)*, Jakarta: Bina Aksara
- G.P. Hoefnagels, 1977, *De Paradox van de Straf*, Zwolle: W.E.J Tjeenk Willink
- H.B. Vos, 1950, *Leerboek van Nederlands Stafrecht*, Harleem : H.D. Tjeenk Willink
- Hamzah, 1985, *Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia

- Harifin A. Tumpa, 2010, *Peluang dan Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- J.E. Sahetapy, S.H., 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung : Citra Adtya Bakti
- J.M.Van Bemmelem, 1984, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta
- Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Jakarta
- Laporan Akhir Tim Pengkaji yang diketuai Prof. Dr. Andi Hamza, SH, tentang “Efektivitas Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia”, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, Tahun 1989/1999.
- Laporan Hasil Penelitian “Ancaman Hukuman Mati dalam Sistem Pemidanaan”, Kerjasama Kejaksaan Agung RI dan FH Undip, 1981/1982.
- Levin Leah, 1987, *Tanya Jawab Soal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Pradnya Paramita
- M. Iqbal Hasan, 2002, *Pokok–Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar- Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Moeljatno, S.H., 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rhineka Cipta
- Muladi, 2005, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)*, Bogor: Ghalia Indonesia
- _____, 1990, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNDIP*, Semarang: UNDIP
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan Pancasila (Perspektif Sejarah Perjuangan Bangsa)*, Jakarta: Grasindo
- Philips, 1960, *A First Book English Law*, London: Sweet & Maxwell Ltd.
- Salman Luthan, 1999, *Kebijakan Kriminalisasi dalam Reformasi Hukum Pidana, Jurnal, Hukum No 11, Vol.6*, Yogyakarta: FH UII
- Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Steven Box, 1983, *Power Crime and Mystification*, London, New York: Tavistock Publication
- Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Pasca Baru Reformasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Tim Penyusun Redaksi KBBI, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Cetakan Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka
- Togardo Siburian, 2009, *Classnote Etika Sosial dan Politik*, STTB, Bandung: STTB.
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Yesmil Anwar & Adang, 2008, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, Jakarta: Grasindo
- Peraturan Perundang – Undangan :**
- UU 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011)
- Ketetapan MPR RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
- Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011)
- Undang-undang No. 12/DRT/1951 tentang Ancaman Pidana Penggunaan, Kepemilikan dan Pemakaian Senjata Api, Amunisi, atau Sesuatu Bahan Peledak.
- Undang-undang No. 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom
- Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia
Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia
Undang – Undang No. 9 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme
Perpu No. 21 Tahun 1959 tentang Memperberat
Ancaman Hukuman Dalam Tindak Pidana
Ekonomi
Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Terorisme
Penpres No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pidana Mati
Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007
Rancangan Undang – Undang (RUU) KUHP 2012